

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu kegiatan penelitian, membutuhkan konsep teori sebagai dasar penjelasan atas latar belakang dan hasil analisis. Berikut ini adalah konsep teori yang digunakan dalam analisis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020”.

A. Landasan Teori

1. Deskripsi Pengangguran

Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan (Putong, 2009:256). Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan (Demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja (Rahardja & Manurung, 2008: 376). Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005:249). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan jumlah tenaga kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja dan belum memperoleh pekerjaan karena adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dan tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Mankiw, 2006:154-155). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka, untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui pendekatan angkatan kerja (*Labour force approach*) besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah orang yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \quad (2.1)$$

Sumber : (Mankiw N, 2006:154)

a. Teori Pengangguran

Teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran di masyarakat terjadi di karena melemahnya daya konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa dan tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar kerja, artinya dalam keadaan perekonomian nasional yang stagnasi permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat akan menurun. Akibatnya produksi perusahaan juga akan menurun dan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai maka akan menyebabkan pengangguran, selanjutnya turunnya produksi harusnya di ikuti dengan turunnya tingkat

upah, tetapi karena tingkat upah yang tidak fleksibel inilah penyebab pengangguran karena defisiensi permintaan agregat (Sukirno, 2010:79).

Berbeda halnya dengan Teori Klasik yang menyatakan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan melakukan penawaran dan mekanisme harga pasar bebas yang dapat menjamin timbulnya kembali permintaan yang menyerap penawaran barang dan jasa. Pandangan klasik berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena mis-alokasi yang terjadi pada sumber daya yang sifatnya sementara kemudian dapat diatasi dengan mekanisme pasar (Gilarso T 2004 : 207).

Kesenjangan yang terjadi dari adanya pengangguran dapat mengurangi tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Menurut Sukirno (2008: 328-331), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- 1) Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;

- 2) Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;
- 3) Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
- 4) Pengangguran Teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

c. Bentuk-Bentuk Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran Musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya;
- 2) Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja;
- 3) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien;
- 4) Setengah Menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari), disebut *underemployment*.

2. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri (UU RI No. 25 Th 2007 Tentang Penanaman Modal). Pengertian Penanaman Modal Asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut (UU RI No. 1 Th 1967) Tentang Penanaman Modal Asing. (Prasaja, 2013).

a. Teori Penanaman Modal Asing

1) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Schumpeter ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi

efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan ini akan memerlukan investasi baru. (Maharani & Isnowati, 2014)

2) UU RI No. 1 Th 1967

Penanaman modal asing merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing secara langsung dengan bertujuan untuk pengembangan modal yang dilakukan secara langsung didalam negeri kepada pihak perusahaan dengan mendasar kepada hukum yang berlaku didalam negeri, dan segala kegiatan usaha yang dilakukan tidak merupakan ada keikut campuran devisa dalam negeri yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan dalam negri segala jenis penemuan, alat-alat dan bahan bahan yang di bawa dari luar negeri dan di pergunakan untuk menjalankan perusahaan dalam negri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan devisa dalam negeri menjadi tanggung jawab dan hak yang dimiliki pihak pemodal asing dan bagian hasil yang didapatkan atas dasar penjalanan modal yang di lakukan oleh perusahaan dalam negeri sifatnya bebas di atur oleh kebijakan perusahaan dan pemilik modal asing. (Kemenkeu, 2007)

b. Macam-macam penanaman modal

1) Penanaman Modal Dalam Negri

Penanaman modal dalam negri merupakan penanaman modal yang dilakukan didalam negri dengan bertujuan kegitan perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemodal yang berasal didalam Negri.

2) Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing merupakan suatu kegiatan penanaman modal didalam negeri yang dilakukan oleh orang luar negeri dengan bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menanamkan modalnya dalam negeri baik dilakukan sepenuhnya oleh orang asing atau dengan cara berpatungan antara orang luar negeri dengan pemodal dalam negeri.

c. Tujuan Penanaman Modal Asing

Adapun tujuan penanaman modal asing yang di lakukan didalam negeri adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan perekonomian nasional secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan daya saing usaha secara nasional maupun secara internasional
- 5) Meningkatkan kapasitas teknologi secara nasional
- 6) Mendorong ekonomi yang berbasis kerakyatan

d. Konsep Penanaman Modal Asing

- 1) Modal asing merupakan modal yang tanamkan oleh perorang yang berasal dari luar Negri, badan hokum, badan usaha asing yang sepuh modalnya dimiliki oleh asing dengan tujuan kegiatan perekonomian

- 2) Penanaman Modal Asing dengan basis perseroan terbatas yang sesuai dengan badan hukum dalam negeri dan berkedudukan dalam Negara republic indonesia dengan didasari undang-undang yang ditetapkan
- 3) Penanaman modal yang dilakukan didalam negeri oleh perseorangan atau badan hokum asing harus mengutamakan tenaga kerja yang ada diwilayah Indonesia
- 4) Penanaman Modal yang dilakukan didalam negara wajib mengutamakan pengembangan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan atau jenis pengembangan apapun yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam negara

3. Upah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 30 menyebutkan :
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Sementara menurut Payaman J.S (2001: 12) menyatakan upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa kerja yang diberikannya bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam bentuk natura. Berdasarkan definisi tersebut diperoleh bahwa upah merupakan imbalan atau balas jasa yang diterima oleh seseorang atas jasa kerja yang telah

dilakukan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini digunakan upah minimum untuk mengetahui bagaimana upah mempengaruhi tingkat Pengangguran.

a. Upah Minimum

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks di Indonesia, mengharuskan pemerintah mengatur upah minimum. Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum di Indonesia ditetapkan dengan dua maksud. Pertama, untuk meningkatkan standar hidup buruh. Kedua, upah minimum sebagai jaring pengaman (*safety net*) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah rendah, Upah minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman karena banyaknya tenaga kerja tidak terampil dan lemahnya serikat buruh sehingga memiliki *bargaining power* yang rendah. Upah minimum di Indonesia pada awalnya ditetapkan dengan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum ditetapkan

dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Hukum yang mengatur upah minimum dibayarkan oleh majikan kepada pekerja adalah sebuah sumber perdebatan yang berkelanjutan. Para pendukungnya memandang bahwa upah minimum adalah suatu cara untuk membantu para pekerja miskin tanpa mengeluarkan biaya dari pemerintah (Mankiw, 2012:446).

b. Teori Upah

1) Teori Upah Alami

Dalam perkembangannya terdapat teori mengenai teori upah, Teori Upah Alami merupakan balik jasa yang di berikan oleh perusahaan kepada buruh atau pekerja namun besarnya hanyalah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan kesejahteraan buruh atau pekerja. Menurut Ricardo jika penetapan harga barang produksi memiliki keuntungan jarak yang jauh dengan biaya-biaya produksi namun kesejahteraan pekerja kurang itu termasuk kedalam teori upah alami, dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi, Adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya masuk ke pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat, dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi (*over supply*) di pasar. Kelebihan penawaran barang akan mendorong harga-harga turun kembali pada kesimbangan semula. Karena biaya-biaya bahan mentah relative konstan, Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup agar

para buruh dapat bertahan hidup saja (hidup secara *subsisten*). Menurut Ricardo, besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat atau melihat besarnya harga pokok yang ada diwilayah tersebut (*custom*). Biasanya tingkat upah ini naik proporsional dengan standar hidup masyarakat (Deliarnov, 2005: 53).

2) Teori Upah Efisiensi

Menurut teori ini perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada diatas tingkat *equilibrium*. akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebihan. Perusahaan penting mempertahankan upah diatas tingkat *equilibrium* karena menurut teori ini membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan mengoptimalkan para pekerja. Penetapan upah minimum tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan kehidupan yang layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota (Pasal 89 UU no. 13/2003). *Efficiency Wage Theory* menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja (meningkatkan produktivitas). Para Ekonom berpendapat bahwa dengan pendapatan yang tinggi maka pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah energinya, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga yang akan berdampak kepada produktivitas perusahaan yang bertambah (Sumarsono, 2009: 95).

4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu periode tertentu (Rahardja & Manurung, 2008:224). Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat Daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut) (Todaro, 2006:144). Menurut Badan Pusat Statistik, Produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi factor-faktor produksi di daerah tersebut.

a. Teori Pertumbuhan ekonomi klasik

Menurut ekonom Klasik, Adam Smith, mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut adam smith di bagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

a) Pertumbuhan Output Total

Sistem produksi nasional suatu Negara terdiri dari tiga unsure pokok, yaitu:

- 1) Sumber Daya Alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- 2) Sumber Daya Insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- 3) Setok Modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat - pertumbuhan output. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada factor-faktor produksi Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertambahan barang modal

ΔL = tingkat pertambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertambahan teknologi

b) Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith pertumbuhan penduduk akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, semakin banyak nya penduduk maka akan semakin memperluas pasar, dengan demikian terjadilah spesialisasi peningkatan perekonomian yang akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di masyarakat.

b. Teori Neo-Liberal

Tokoh aliran Neo-Liberal Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dipacu setinggi-tingginya. (Syahyuti, 2006:95)

c. Cara Perhitungan dan Penyajian PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik, cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan
- i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan, diantaranya:

- a) Kompensasi untuk pekerja terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji (misalnya, rencana dari pengusaha dalam hal pensiun dan dana jaminan sosial).
- b) Keuntungan perusahaan merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, dibagikan kepada para pemilik saham sebagai *dividen* dan ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

- c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, *self employed professional* dan lain-lain.
- d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, rental *business* dan *residential properties*.
- e) Bunga *netto* atau *net interest* terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga *netto* yang diterima dari luar negeri, bunga yang dibayar pemerintah dan konsumen tidak termasuk didalamnya.

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga, modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan. Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mengubah harga tahun dasar, yang semula tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun 2000 karena beberapa alasan berikut :
 - a) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk produk baru.

- b) Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam *System of National Account (SNA)* 2008.
- c) Perekonomian Indonesia relatif stabil.

5. Pembangunan Manusia

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap masyarakat dan institusi institudi nasional dan factor kelembagaan, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut dengan tetap mengacu pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006:28) terdapat tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu :

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan, perlindungan dan keamanan .
- b. Peningkatan dtandar hidup yang tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from seservitude*) yang merupakan hak asasi manusia perluasan pilihan-pilihan

ekonomis dan social bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap penghambat dan ketergantungan.

Menurut ahli ekonomi Amartya Sen mengatakan bahwa pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*), dimana pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis, dengan menghilangkan kemiskinan dan berbagai penderitaan seperti kekurangan pangan, malnutrisi, pengidapan penyakit, buta huruf, ketiadaan kebebasan sipil dan hak berdemokrasi, diskriminasi, serta berbagai bentuk perampasan hak-hak milik pribadi (kuncoro,2013:221-222)

Menurut Todaro (2011:53) terdapat tiga indikator dasar atas segi pembangunan antara lain :

- a. Pendapatan riil perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (*purchasing power*).
- b. Kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, asupan nutrisi dan tingkat moralitas anak.
- c. Pencapaian pendidikan yang diukur dengan tingkat melek huruf (aksara) dan tingkat pendidikan (lama sekolah)

Pembangunan Manusia merupakan hal penting terutama bagi sebagian Negara khususnya bagi negara-negara berkembang hal ini disebabkan karena banyak Negara yang tingkat pertumbuhannya tinggi namun gagal menghadapi kesenjangan social dan kemiskinan selain itu pembangunan manusia merupakan

Investasi tidak langsung untuk mencapai tujuan perekonomian Nasional (Christina, 2011)

a. Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah proses yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau system social, internasional dan ekonomi secara keseluruhan untuk berupaya sekeras mungkin menuju kehidupan yang lebih baik (Todaro,2006:26) Badan perserikatan bangsa-bangsa(PBB) menetapkan suatu ukuran standard pembangunan manusia yaitu IPM atau HDI indeks ini di kembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom Pakistan yang di bantu oleh Gustav Ranis IPM adalah indicator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pmbangunan social ekonomi (Todaro,2011:57. Kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan

Indeks pembangunan manusia (*human development indeks*) mengurutkan semua Negara pada skala 0 (yang paling rendah kategori pembangunan manusia) hingga 1 (yang paling tinggi kategori pembangunan manusianya). (Todaro,2000:71)

Peningkatan IPM semua Negara dibagi 3 kelompok yaitu (kuncoro,2013,223)

- Pembangunan Manusia Rendah (*Low Human Development*) bila nilai IPM sebesar 0,0 sampai 0,50
- Pembangunan Manusia Menengah (*Medium Human Development*) bila nilai IPM berkisar 0,51 sampai 0,79

- Pembangunan Manusia Tinggi (*High human Development*) bila nilai IPM berkisar 0,80 samapai 1,0

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup dan IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang dimana dimensi tersebut umur panjang yang sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak, ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak, ketiga dimensi ini sangat penting untuk meentukan tingkat kemampuan suatu Negara dalam meningkatkan IPM nya. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sangat mempengaruhi satu sama lainnya .selain itu di pengaruhi oleh beberapa factor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang di tentukan oleh Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan Kebijakan Pemerintah (Tambun,2003:167).

Dalam Pembangunan Manusia terdapat hal yang penting yang perlu menjadi perhatian utama(UNDP,1995:118) yaitu:

- a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

- b) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, tidak hanya meningkatkan kepadatan mereka oleh karena itu konsep Pembangunan Manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan dan bukan hanya aspek ekonomi saja.
- c) Pembangunan Manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) tetapi harus juga berupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d) Pembangunan Manusia didukung dengan empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan
- e) Pembangunan Manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu di perhatikan lebih lanjut empat pilar yang mendukung Pembangunan Manusia, dan di jabarkan lebih lanjut oleh UNDP (1995), empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia tersebut adalah :

- a) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
- b) Ekuitas, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil, semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

- c) Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus di pastikan tidak hanya untuk generasi sekrang tapi juga untuk generasi yang akan dating, segala bentuk permodalan fisik, maanusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi.
- d) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka, masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keutusan dan prosese-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith dalam Perkembangan Ekonomi diperlukan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan output, karena dapat meningkatkan ketrampilan dan kemampuan setiap pekerja dalam bidangnya. Pembagian kerja dapat mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan, serta mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru yang akhirnya mempercepat dan meningkatkan produksi. Adanya pembagian kerja juga harus diseimbangi dengan akumulasi modal yang berasal dari dana tabungan. Disamping itu, perluasan juga perlu dilakukan agar dapat menampung hasil produksi. Perluasan pasar juga dapat dilakukan dengan perdagangan internasional. Hal ini akan menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Jika perluasan pasar, akumulasi modal dan pembagian kerja telah mencukupi hal ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan

menaikkan penghasilan nasional. Jika penghasilan Nasional meningkat maka kesejahteraan juga meningkat hal ini menyebabkan penambahan jumlah penduduk. (Rizky, Agustin, & Mukhlis, 2016)

c. Metode Penghitungan IPM

adapun komponen IPM disusun dari tiga komponen yaitu usia panjang yang di ukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang di ukur dengan rata-rata melek huruf dan rata rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan layak yang di ukur dengan pengeluaran perkapita rill yang telah disesuaikan (Kuncoro,2013:222), indeks ini merupakan rata-rata kesederhanaan dari ketiga komponen diatas yang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{indeks X1} + \text{indeks X2} + \text{indeks X3})$$

Sumber : (Kuncoro, 2013:222)

Dimana :

X1 = harapan hidup

X2 = tingkat pendidikan $\frac{2}{3}$ (melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (rata-rata lama sekolah)

X3 = tingkat kehidupan yang layak

Masing-masing komponen tersebut lebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik) untuk memudahkan dalam analisa biasanya indkes ini di kalikan 100. Teknik penyusunan indkes tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut (Kuncoro,2013,222)

$$\text{indeksX1} = \frac{xi - xmin}{xmaks - xmin}$$

Sumber : (Kuncoro, 2013:222)

dimana :

X_i = komponen IPM ke i

X_{min} = Nilai minimum dari komponen IPM ke i

X_{max} = Nilai maksimum dari komponen IPM ke i

d. Komponen-komponen IPM

Secara khusus IPM mengukur capaian Pembangunan Manusia berdasarkan tiga komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur pencapaian di bidang pendidikan dan rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (M. Hardiyani, 2015). Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dan badan pusat statistik (BPS) komponen-komponen indeks pembangunan manusia antara lain:

a) Lamanya hidup/Angka harapan hidup (*longevity*)

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*). Angka e_0 yang disajikan pada tulisan ini merupakan hasil penghitungan tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan paket program *mortpack*. Berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun dan

dengan memperhatikan trend hasil sensus penduduk dan survey antar sensus. Penghitungan di lakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Standarisasi Angka harapan Hidup

Indikator	Nilai maksimum	Nilai minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	UNDP
Angka Melek Huruf (%)	100	0	UNDP
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	UNDP
Konsumsi Rill Per Kapita (Tahun)	732.720	300.000	UNDP

Sumber : (UNDP, 1995)

Proyeksi dari daya beli tertinggi yang dapat dicapai di Jakarta pada tahun 2018 (akhir dari pembangunan jangka panjang II) setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi ini berdasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5 % pertahun selama periode 1993-2018. Sama dengan dua kali garis kemiskinan di provinsi yang dimiliki tingkat konsumsi perkapita terendah pada

tahun 1990, nilai minimum yang disesuaikan menjadi Rp 360.000. penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis sebagaimana terlihat dari peringatan angka kemiskinan dan penurunan rill. Penambahan sebesar Rp. 60.000 didasarkan pada perbedaan antara garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp. 5.000 perbulan (Rp. 60.000 pertahun)

b) Tingkat Pendidikan

Komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah presentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bias membaca dan menulis huruf latin atau huruf Lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga , bobot sepertiga sisanya diberikan pada indikator rata-rata lamanya sekolah (MYS Mean Year of Schooling), yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah di jalani. Indikator ini di hitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

c) Standard Hidup Layak (purchasing power parity/ PPP)

Standard hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen diatas yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP rill perkapita yang disesuaikan untuk mengukur standard hidup layak, BPS dalam menghitung standard hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita rill yang

disesuaikan dengan formula atksion.Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing-masing daerah/ wilayah, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut, diantaranya tingkat status pembangunan manusi dan tingkat pertumbuhan IPM.

Komponen IPM Manusia Hidup (longevity), Pengetahun (knowledge) dan Standar Hidup Layak (decent living). Dalam Pembangunan Manusia yang pertama di lakukan adalah mengusahakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat.Usia hidup menurut UNDP diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir yang di notasikan dengan eo. Eo dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass, varian trussel) berdasarkan variable rata-rata anak yang masih hidup. Komponen kedua dalam pembangunan manusia adalah komponen pengetahuan, komponen itu diukur dengan menggunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data sensenas KOR.Indikator angka melek huruf diperoleh dari variable kemampuan membacca dan menulis, sedangkan inidkator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variable secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang ditempuh / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.Komponen ketiga dalam pembangunan manusia adalah komponen standar hidup layak yang diukur dengan indicator rata-rata konsumsi rill yang telah disesuaikan. Ada beberapa indicator yang dapat digunakan untuk mengukur komponen ini namun dengan pertimbangan ketersediaan data secara internasional, UNDP menggunakan indicator PDB rill yang disesuaikan sebagai ukuran komponen tersebut.

B. Study Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian yang relevan didasarkan atas kesamaan variabel dependen maupun independen, metode analisis data serta hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitiannya antara lain:

- 1) Hamidah Muhd Irpan¹, Rosfadzimi Mat Saad¹, Abu Hassan Shaari Md Nor, Abd Halim Md Noor, and Noorazilah (2016).

Dengan judul penelitiannya - *Impact of Foreign Direct Investment on the Unemployment Rate in Malaysia*. dalam penelitiannya menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negative signifikan artinya jika investasi berkurang maka pengangguran akan tinggi

- 2) Johnny N, Timipere ET Krokeme O, & Markjackson D (2018)

Dengan penelitiannya yang berjudul - *Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment rate in Nigeria (1980-2015)* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi asing berpengaruh negative tidak signifikan

- 3) Rabiul Islam, Abdul Bashawir Abdul Ghani, Abirama Sundari (2017)

Dengan penelitiannya yang berjudul - *Effect Of Minimum Wage Rate Towards The Unemplotment Rate201*” Dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran

4) Mukti Hadi Prasaja (2013)

Dengan penelitiannya yang berjudul – “*Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011*” Dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, artinya jika PMA naik maka tingkat pengangguran akan menurun.

5) Alfredo Y Mahihody, Daisy S. M. Engka , Antonius Y. Luntungan (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul - *Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran artinya jika upah naik maka pengangguran akan menurun

6) Trianggono Budi Hartanto & Siti Umajah Masjkuri (2017)

Dengan judul penelitiannya – “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*” Dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan untuk variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

7) Hasan Basri dan Indra Mayesti (2019)

Dengan judul penelitiannya - *“Analisis Pengaruh Ump, Inflasi, Ipm, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jambi”* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran dan untuk variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap variabel pengangguran.

8) Tengko Sarimuda RB Soekarnoto (2014)

Dengan judul penelitiannya - *“Pengaruh Pdrb, Umk, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011”* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel PDRB dan Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.

9) Dian Priastiwi (2019)

Dengan judul penelitiannya - *“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa”* Tengah dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel upah minimum dan produk domestic regional bruto berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran.

10) Rio Laksamana (2016)

Dengan judul penelitiannya - *“Pengaruh Pdrb Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat”* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel produk domestic regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel pengangguran artinya jika nilai PDRB naik maka tingkat pengangguran akan menurun.

- 11) Olivia Fictoria Lamatenggo, Een N. Walewangko, Imelda A.C Layuck (2019)

Dengan judul penelitiannya – *“Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Di Kota Manado”*

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negative tidak signifikan terhadap variable pengangguran.

- 12) Muhammad Nurcholis (2014)

Dengan judul penelitiannya – *“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014”* Dalam penelitiannya

menyatakan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran dan untuk variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

- 13) M. Arizal & Marwan (2019)

Dengan judul Penelitiannya – *“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat”* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran dan untuk variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.

Tabel 2.2
Studi Empiris

No.	Judul & Penulis	Metode / Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hamidah Muhd Irpan (2016) <i>Impact of Foreign Direct Investment on the Unemployment Rate in Malaysia</i> Publikasi : IOP publishing	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Investasi Asing Langsung	X1:Tolak H_0 Dengan hubungan negatif
2.	Johnny N, Timipere ET Krokeme O, & Markjackson D (2018) <i>Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment rate in Nigeria (1980-2015)</i> Publikasi: Hrmars	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Investasi Asing Langsung	X1 : Tolak H_0 dengan hubungan negative
3.	Rabiul Islma, Ahmad Bashawir Abdul Ghani dan Abirama Sundari (2017)	Ols	Variabel Dependen : Tingkat pengangguran Variabel Indevenden : X1 : Upah Minimum	X1 ; Tolak H_0 dengan Hubungan Positif
4.	Mukti Hadi Prasaja (2013) Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan	Data Panel	Variabel Dependen : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Investasi Asing X2 : Jumlah	X1 : Tolak H_0 dengan hubungan negatif X2 : Tolak H_0 dengan hubungan

No.	Judul & Penulis	Metode / Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
	Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011 Publikasi : Jurnal unnes		Penduduk X3 : Inflasi	positif X3 : Tolak Ho dengan hubungan positif
5.	Alfredo Y Mahihody (2018) Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado Publikasi: International Journal of Business and Social Science	Ordinary Least Squares (OLS)	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Upah X2 : Indeks Pembangunan Manusia	X1: Tolak Ho dengan huungan negatif X2 : Tolak Ho dengan hubungan negatif
6.	Trianggono Budi Hartanto & Siti Umajah Masjkuri (2017) <i>Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur</i>	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Jumlah Penduduk X2 : Pendidikan X3 : Upah Minimum X4 : Produk Domestik Regional Bruto	X1 : Tolak Ho dengan pengaruh positif X2: Tolak Ho dengan pengaruh positif X3: Tolak Ho dengan pengaruh negative X4: Tolak Ho dengan pengaruh positif

No.	Judul & Penulis	Metode / Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Tahun 2010-2014</i>			
7.	Hasan Basri dkk (2019) <i>Analisis Pengaruh Ump, Inflasi, Ipm, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jambi</i>	Time Series	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : UMP X2 : Inflasi X3 : Indeks Pembangunan Manusia X4 : Pertumbuhan Ekonomi	X1 : Tolak Ho dengan pengaruh positif X2:Tolak Ho dengan pengaruh positif X3:Tolak Ho dengan pengaruh negatif X4: Tolak Ho dengan pengaruh positif
8.	Tengkoe Sarimuda RB Soekarnoto (2014) <i>Pengaruh Pdrb, Umk, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011</i>	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Produk Domestik Regional Bruto X2 : UMK X3 : Inflasi X4 : Investasi	X1: Tolak Ho dengan hubungan negatif X2: Tolak Ho dengan pengaruh negatif X3: Tolak Ho dengan pengaruh positif X4: Tolak Ho dengan pengaruh negatif
9.	Dian Priastiw (2019) <i>Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran</i>	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Jumlah Penduduk X2 : Pendidikan X3 : Upah Minimum X4 : Produk Domestik Regional	X1: Tolak Ho dengan pengaruh positif X2: Tolak Ho dengan pengaruh negatif X3: Tolak Ho dengan pengaruh negatif X4: Tolak Ho

No.	Judul & Penulis	Metode / Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah</i>		Bruto	dengan pengaruh negatif
10.	Rio Laksamana (2016) <i>Pengaruh Pdrb Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat</i>	OLS	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : PDRB	X1 : Tolak Ho dengan hubungan negative
11.	Olivia Fictoria Lamatenggo dkk (2019) <i>Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Di Kota Manado</i>	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Inflasi X2 : Pertumbuhan Ekonomi X3 : Indeks Pembangunan Manusia	X1: Tolak Ho dengan hubungan positif X2: Tolak Ho dengan hubungan negatif X3: Tolak Ho dengan hubungan negatif
13.	Muhammad Nurcholis (2014) <i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014</i>	Data Panel	Variabel Dependen : Y : Pengangguran Variabel Independen : X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Upah Minimum X3 : Indeks Pembangunan Manusia)	X1: Tolak Ho dengan hubungan negatif X2: Tolak Ho dengan hubungan positif X3: Tolak Ho dengan hubungan positif
12.	M. Arizal &	Data Panel	Variabel Dependen :	

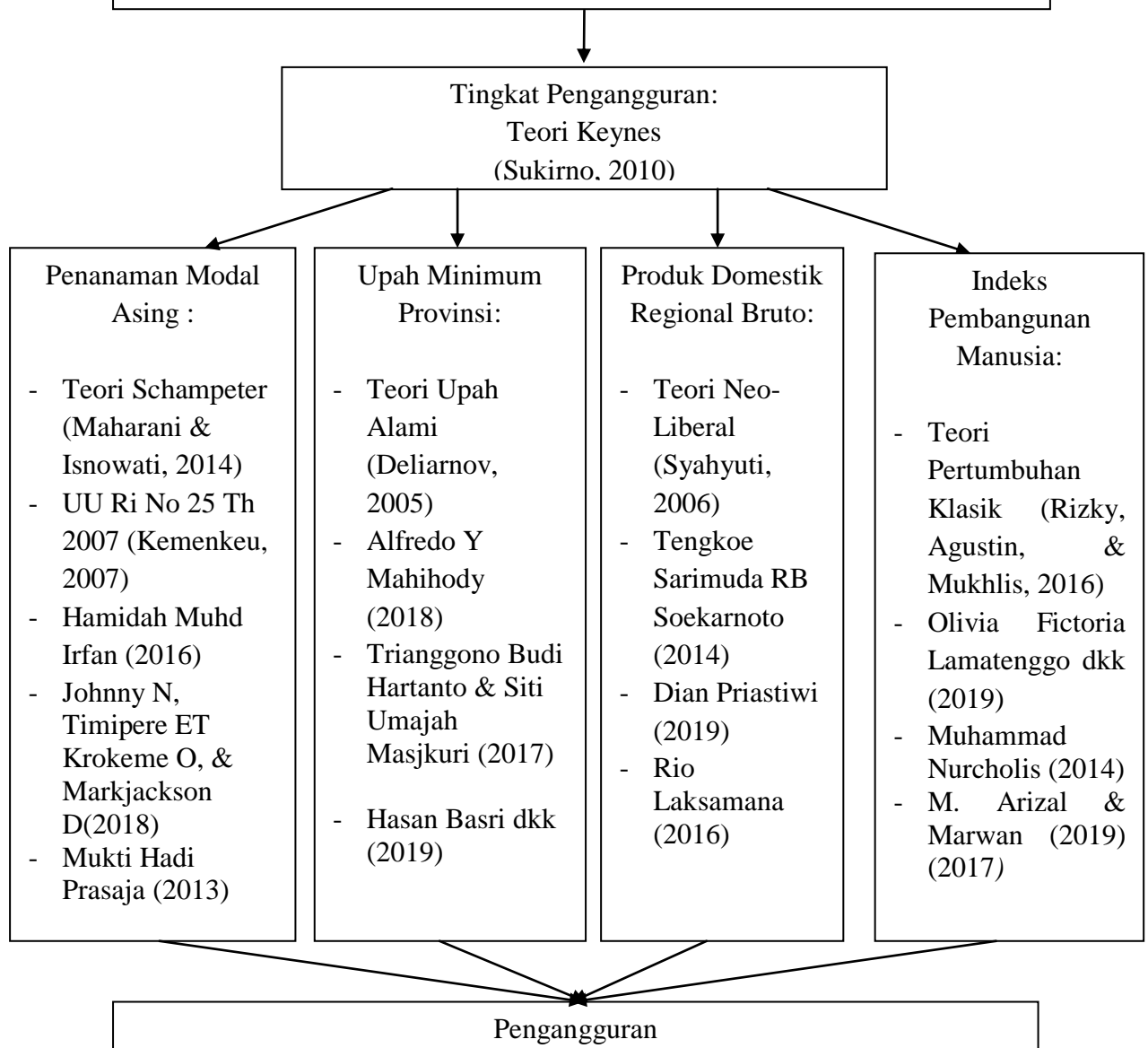
No.	Judul & Penulis	Metode / Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>Marwan (2019) <i>Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat</i></p>		<p>Y : Pengangguran</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Produk Domestik Regional Bruto</p> <p>X2 : Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>X1: Tolak Ho dengan hubungan negatif</p> <p>X2: Tolak Ho dengan hubungan positif</p>

C. Kerangka Pemikiran

Dari teori yang sudah dipaparkan dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan suatu kerangka pemikiran yang akan berguna untuk menjawab permasalahan secara umum serta dijadikan acuan untuk menggambarkan kerangka penelitian. Dalam 6 tahun terakhir tingkat pengangguran pada 10 provinsi di pulau Sumatra tahun 2015 sampai dengan 2020 masih tergolong tinggi, 35,71 persen dari keseluruhan Provinsi yang nilai presentase Penganggurannya diatas nilai Nasional berada di Pulau Sumatera ini semua akan menghambat proses laju pertumbuhan perekonomian yang ada di pulau Sumatra. Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari teori dan hasil studi empiris, menunjukkan adanya pengaruh dari penanaman modal asing, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran. Oleh karena itu, harus ada penelitian terbaru untuk menganalisis pengaruh yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran serta untuk mengurangi permasalahan tingkat pengangguran.

Kerangka Pemikiran

Dalam 3 tahun terakhir 2017-2019 35,71 persen tingkat pengangguran yang nilainya di atas rata rata nilai tingkat pengangguran nasional berada di Provinsi pada Pulau Sumatera, ini semua akan menghambat proses laju pertumbuhan perekonomian yang ada di pulau Sumatera. Oleh karena itu, harus ada penelitian terbaru untuk menganalisis pengaruh yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran serta untuk mengurangi permasalahan tingkat pengangguran tersebut.

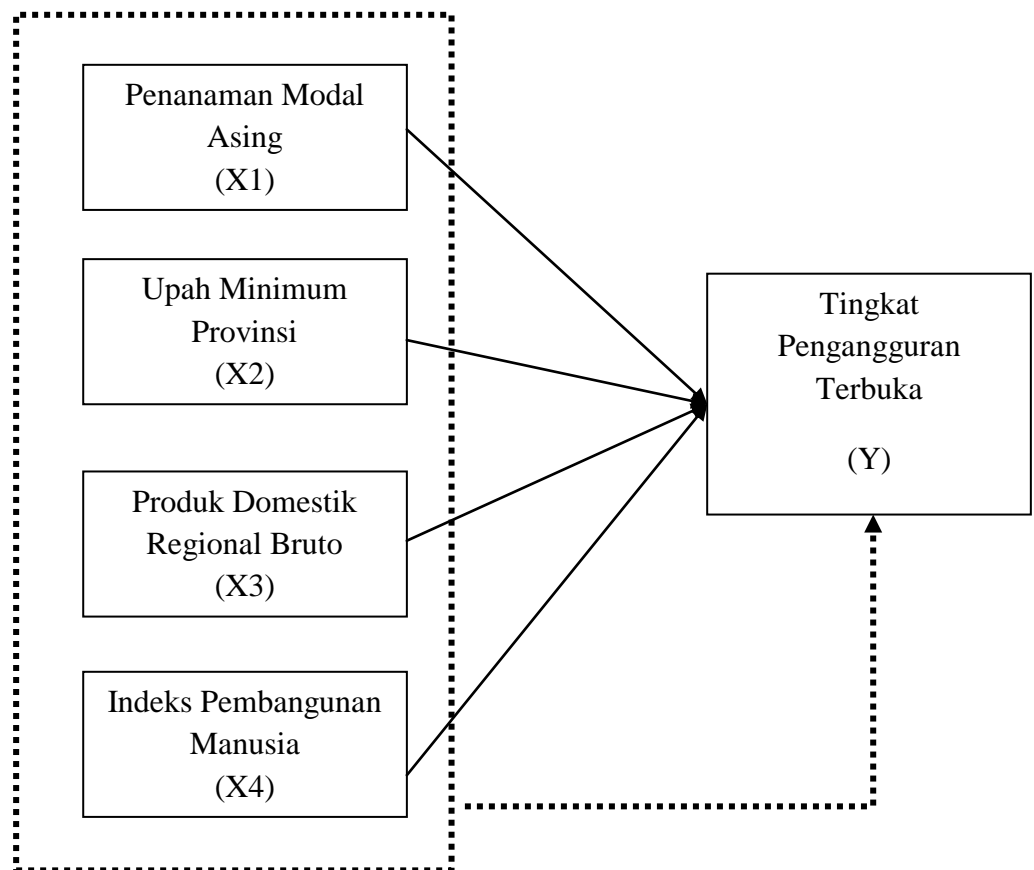


Gambar 2.1

Dalam penelitian ini Penanaman Modal Asing, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia dijadikan

variabel-variabel bebas yang secara parsial mempengaruhi Tingkat Pengangguran pada Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera. Skema hubungan antara tingkat Pengangguran dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema Paradigma Penelitian



Gambar 2.2

Gambar 2.3 menunjukkan adanya hubungan variabel – variabel penelitian, yang meliputi variabel Penanaman Modal Asing, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka, berdasarkan hasil sejumlah penelitian dan analisis data

panel terdahulu, ditandai dengan tanda panah yang menunjukkan adanya pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti berupaya menguji apakah pengaruh serupa terjadi pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan fokus pertanyaan apakah variabel Penanaman Modal Asing, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto dan Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Hubungan Penanaman Modal Asing Terhadap Pengangguran

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran juga berbeda antara tempat-tempat karena perilaku sosial dan pembangunan ekonomi. Banyak negara Afrika dan Amerika Latin menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi karena di bawah pembangunan infrastruktur dan ekonomi (Irfan, 2015) menurut Krokeme dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi asing langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sehingga jika investasi bertambah atau naik maka akan mengurangi angka pengangguran, Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Prasaja, (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran artinya jika nilai penanaman modal asing meningkat maka akan menurunkan angka pengangguran, namun berbeda dengan penelitian Syahputri (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di kota Medan.

2. Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang besar dan vital bagi seluruh negara di dunia. Menurut Budhi dalam Sirait dan Marhaeni (2013) negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, menurut Hartanto (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran, pernyataan tersebut juga di kemukakan oleh Alfredo Y Mahihody (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran artinya jika PMA naik maka pengangguran akan menurun, namun berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Hasan Basri dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran

3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengangguran

Salah satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah PDRB. Dalam Hukum Okun dinyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan negative antara pengangguran dengan produk domestik regional bruto Marwan (2019) dalam penelitian yang di lakukan oleh Laksamana (2016) menyatakan bahwa prdofuk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran artinya jika nilai PDRB naik maka tingkat pengangguran akan menurun, dalam penelitian lainnya yang di lakukan oleh Priastiwi (2019) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negative terhadap pengangguran artinya jika nilai PDRB naik maka tingkat pengangguran akan

menurun namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiranggono(2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran artinya jika nilai PDRB naik maka angka pengangguran akan mengikuti naik.

4. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran

Menurut Sukirno (2010: 50), salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, hal ini yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lamatenggo(2019) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran artinya jika nilai IPM naik maka tingkat pengangguran akan menurun, penelitian lainnya mengungkapkan Nurcholis (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh Penanaman Modal Asing, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Parsial terhadap Tingkat Pengangguran Pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
2. Terdapat Pengaruh Penanaman Modal Asing, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran Pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.